

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arifin Tahir, Msi, Msi Rusli Isa, And Yacop Noho Nani. *Buku Ajar Kapita Selekta Manajemen Pemerintah Daerah*. Cv. Cahaya Arsh Publisher & Printing, 2024.

A.Ubaedillah, Abdul Rozak, Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) (Cet. I; Jakarta: Icce, Kencana, 2008).

Andrew Heywood. *Political Theory: An Introduction 4th. Edition*. Terj. Pengantarteori Politik. E.Setiyawati. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.

Ateng Syafrudin, *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan Daerah*, (Bandung :Tarsito.

Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah, Menurut Undang-Undang*, (Jakarta : Sinar Harapan).

Bagir Manan, *Teori Dan Politik Konstitusi* , Cet. Kedua,(Yogyakarta : Fh Uii), 2004.

Bagir Manan, *Teori Dan Politik Konstitusi*, (Yogyakarta : Fakultas Hukum Uii), 2003.

Bagir Manan, Wewenang Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah , Makalah Pada Seminar Nasional Pengembangan Wilayah Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Kawasan Pesisir Dalam Rangka Penataan Ruang, Fak. Hukum Unpad Bandung, 2000.

Clerence J.Dias 1975, Research On Legal Service And Poverty; Its Relevance To The Design Of Legal Service Program In Developing Countries, Wash Ul.

Disertasi, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Rajawali Press. Jakarta.

Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*,(Jakarta: Gramedia), 1987.

Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*,(Jakarta: Gramedia, 1987).

- H.D. Va. Wijk/Willem Konijnenbelt, Dalam Ridwan Hr, Hukum Administrasi Negara, Uui Press, Jakarta, 2003.
- Hanfree Bunga ‘ Allo. “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Oleh Gubernur*”. Hukum Administrasi Negara. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar, 2016.
- Hanif Nurcholis, *Teori Dan Praktek Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Edisi Revisi Grasindo), 2012.
- Hanif Nurcholis, *Teori Dan Praktek Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Edisi Revisi Grasindo).
- Hari Kusuma, *Perkembangan Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Pt Anucara), 2016.
- Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary*, West Publishing, 1990.
- Hertati, Diana. *Reformasi Birokrasi Tataran Pemerintahan*. Thalibul Ilmi Publishing & Education, 2024.
- Huraerah, Abu. *Kebijakan Perlindungan Sosial: Teori Dan Aplikasi Dynamic Governance*. Nuansa Cendekia, 2022.
- Joko Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem Dan Problema*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta).
- Nurdin, H Boy, And M H Sh. *Kedudukan Dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Penerbit Alumni, 2021.
- Phillipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Yuridika, No. 5 & 6 Tahun Xii, Sep-Des 1997, Hal.1 (Philipus M. Hadjon Iii).
- Poerwasunata, W.J.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta : Balai Pustaka, 2003.
- Prabowo, Hadi, Dadang Suwanda, And Wirman Syafri. “Inovasi Pelayanan Pada Organisasi Publik.” Cv Remaja Rosdakarya, 2022.
- Prasojo, Eko. *Isu-Isu Kontemporer Kebijakan Dan Governansi Publik Di Indonesia*. Prenada Media, 2023.
- Prof. Dr. Faisal Abdullah, S.H., M.Si. *Jalan Terjal Good Governance Prinsip, Konsep & Tantangan Dalam Negara Hukum*. PuKAP, 2009.
- Rumaratu, Bella Nabila K Rumaratu. “Manajemen Dakwah Islam Dalam Organisasi Muhammadiyah Kota Sorong Papua Barat.” Iain Manado,

2022.

Salim, H.S Dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis

Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan).

Sjachran Basah, *Eksistensi Dan Tolak Ukur Peradilan Administrasi Di Indonesia*. Alumni, Bandung, 1985.

Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Pt.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sunarso, H Siswanto, And M H Sh. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Sinar Grafika, 2023.

Tedi Sudrajat, S H, And S H Endra Wijaya. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Bumi Aksara, 2021.

Tedi Sudrajat, *Hukum Birokrasi Pemerintah Kewenangan Dan Jabatan*, Cet.1, (Sinar Grafika, Jakarta).

Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Cet, Ke 4, (Jakarta : Grafindo).

Wjs, Poerwadarminta. "Kamus Umum Bahasa Indonesia." *Jakarta: Balai Pustaka*, 1976.

Yarni, Meri Dan Latifah Amir. 2014. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Pilar Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*.

Yustisia, Tim Visi. *Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Perubahannya*. Visimedia, 2015.

Jurnal

Abustan, Abustan. "Implementasi Demokrasi Dan Legitimasi Penjabat Kepala Daerah Di Indonesia." *Indonesia Law Reform Journal* 2, No. 3 (2022): 274–87.

Adriansyah, Ahyar, And Zainal Abidin. "Kekuatan Hukum Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/Sj Dalam Memperluas

Kewenangan Penjabat Kepala Daerah.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan* 8, No. 2 (2024): 150–62.

Ahmad, Saiful, Fahmy Adriawan Simin, And Muh Haikal Umakaapa. “Konflik Kewenangan Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Kasus Pejabat Bupati Pulau Morotai Maluku Utara Tahun 2022.” *Comserva: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 2, No. 09 (2023): 1729–42.

Ahmad Gelora Mahardika, Sun Fatayati, Dkk. Problematika Yuridis Pengisian Penjabat Sementara Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Legacy : Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* Vol 2 No 2 - Agustus 2022.

Ahmad Gelora Mahardika, Sun Fatayati, Ferry Nahdian Furqan. *Problematika Yuridis Pengisian Penjabat Sementara Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, *Legacy : Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* Vol 2 No 2 - Agustus 2022.

Aithan, Ibnu, And Syamsir Syamsir. “Reformasi Sistem Pengawasan.” *Bundling: Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 1, No. 1 (2024): 1–8.

Amelia, Dian, Ulfanora Ulfanora, And M Iflah Febrizal. “Akibat Hukum Kartu Keluarga Bagi Pasangan Kawin Tidak Tercatat Menggunakan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.” *Unes Law Review* 6, No. 2 (2023): 4615–27.

Amini, Aisyah. “Analisis Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Akibat Pilkada Serentak Tahun 2024 Ditinjau Menurut Prinsip Demokrasi Dan Fiqh Siyāsah.” *Uin Ar-Raniry Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2023.

Andriani, Ramadini. “Analisis Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/Sj Tahun 2022 Tentang Persetujuan Kepada Pelaksana Tugas/Penjabat/Penjabat Sementara Kepala Daerah Dalam Aspek Kepegawaian Berdasarkan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Hukum Administrasi Negara*, 2023.

Andyansyah, Andyansyah. “Pada Masa Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Penataan Kepegawaian Dalam Mewujudkan Good Governance.” *Univ Jambi*, N.D.

- Ani, Nuryani. "Penambahan Kewenangan Mutasi Pegawai Oleh Penjabat Kepala Daerah Dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/Sj Perspektif Masalah Mursalah." Uin Prof. Kh Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.
- Ardipandanto, Aryojati. "Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020: Evaluasi Pelaksanaan Dan Kebijakan." *Kajian* 26, No. 1 (2023): 51–74.
- Ariska, Yogi, And Gema Irhamdhika. "Representasi Kecurangan Pemilu 2024 Dalam Film Dokumenter 'Dirty Vote':(Studi Semiotika Charles Sanders Pierce)." *Jurnal Media Penyiaran* 4, No. 1 (2024): 8–19.
- Ariyanto, Bambang. "Pengelolaan Hubungan Pusat Dan Daerah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, No. 2 (2020): 37–57.
- Arnazaye, Furaihan KamyI Arnazaye, Ariq Nabil Sulaiman, And Muh Imam Kastholani. "Efektivitas Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Dalam Perspektif Demokrasi Dan Teknokrasi." *Jurnal Publik* 17, No. 01 (2023): 29–39.
- Ashari, Ashari, Muh Alfian Fallahiyan, Agung Setiawan, And Rahmadani Rahmadani. "Implikasi Kewenangan Penjabat Kepala Daerah Dalam Tata Kelola Kepegawaian Setelah Adanya Se Mendagri Nomor 821/5492/Sj." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, No. 1 (2024): 11635–44.
- Assyayuti, Mazdan Maftukha. "Urgensi Penataan Ulang Mekanisme Pengisian Jabatan Penjabat Kepala Daerah Perspektif Demokrasi Konstitusional." *Lex Renaissance* 7, No. 2 (2022): 281–95.
- Bakri, Riani, And Murtir Jeddawi. "Kedudukan Hukum Dan Kewenangan Penjabat Kepala Daerah Legal Position And Authority Of Acting Regional Heads" 6, No. 1 (2024).
- Bauw, Lily. "Special Autonomy Of Papua: A Review From The Perspective Of The Unitary State Of The Republic Of Indonesia." *Papua Law Journal* 1, No. 1 (2018): 1–26. <https://doi.org/10.31957/Plj.v2i2.578>.
- Desiana, Uilly Sigar. "Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Honorer Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara." *Lex Administratum* 9, No. 1 (2021).

- Dio Ekie Ramanda. Menata Ulang Kewenangan Mengangkat Penjabat Kepala Daerah, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (Jisip)*, Vol. 6, No. 3 Juli 2022.
- Duadji, N. (2012). Good Governance Dalam Pemerintah Daerah. *Mimbar*, Vol. 28, No. 2, 201-209.
- Else Suhaimi, Myasin, "Problematika Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah", *Ejournal Unri*, Vol.9, 2021.
- Fatahillah, Zahrul. "Tingkat Kepatuhan Masyarakat Aceh Terhadap Surat Edaran Penjabat Gubernur Aceh Nomor 451/11286." *Maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2023, 129–38.
- Fauzani, Addi, And Aprilia Wahyuningsih. "Problematika Penjabat Dalam Mengisi Kekosongan Jabatan Kepala Daerah." *Prosiding Call For Papers Hukum Kenegaraan, Departemen Hukum Tata Negara Dan Departemen Hukum Administrasi Negara Fh Uii*, 2021, 337–54.
- Hadji, Kuswan, Athalla Fikra Yazdaniar, David Fahriza Ali, Aditya Arif Pratama, Revaldo Putra Magantara, Dhimas Arya Kamandanu, And Muhammad Nurhisyam Fachri Hakim. "Urgensi Penunjukan Penjabat Gubernur Untuk Mendukung Program Pemerintah." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 3, No. 9 (2024): 43–54.
- Herlambang, Embang, Deny Guntara, And Muhamad Abas. "Optimalisasi Pengawasan Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2023." *Binamulia Hukum* 12, No. 1 (2023): 47–56.
- Huda, Ni'matul. "Kedudukan Dan Materi Muatan Peraturan Menteri Dalam Perspektif Sistem Presidensial." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, No. 3 (2021): 550–71.
- Huroiroh, Ernawati, And Mochammad Fauzi. "Konsep Negara Federasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 2, No. 1 (2022): 18–41.
- Husen, Ahmad. "Eksistensi Peraturan Presiden Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan." *Lex Scientia Law Review* 3, No. 1 (2019): 69–78.
- Hutapea, Edison Bonartua, And Dedi Saputra. "Strategi Komunikasi Politik Pasangan Calon Al Haris Dan Abdullah Sani Dalam Memenangkan

- Pilkada Gubernur Jambi Tahun 2020.” *Oratio Directa (Prodi Ilmu Komunikasi)* 6, No. 1 (2024).
- Irfani, Hafid, And Asri Elies Alamanda. “Prinsip Keterbukaan Dan Akuntabilitas Dalam Pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Daerah.” *Justitiable-Jurnal Hukum* 6, No. 2 (2024): 165–81.
- Ismed Kelibay,Irwan Boinauw,Dkk, “*Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024*”, Journal Aldev, Vol.8, 2022.
- Juanda, Ogiandhafiz , “ *Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Menghadapi Pilkada Serentak 2024 Dalam Perspektif Hukum Tata Negara*”, Ejournal President, Vol.5. 2022.
- Karmanis, Karmanis. “Electronic-Voting (E-Voting) Dan Pemilihan Umum (Studi Komparasi Di Indonesia, Brazil, India, Swiss Dan Australia).” *Mimbar Administrasi* 18, No. 2 (2021): 11–24.
- Kadarisman, M. (2018). Analisis Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara Di Pemerintah Kota Depok. *Civil Service Journal*, 12 (2 November).
- Khairiah, Umi, Ervina Sari Sipahutar, And Anjani Sipahutar. “Sinergitas Kewenangan Polri Dan Pemerintah Daerah Dalam Bidang Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Dalam Otonomi Kedaerahan.” *Jurnal Normatif* 4, No. 1 (2024): 336–44.
- Kirana, Adelia Nindya, Laurene Patricia, Monica Wijaya, Sonya Davinia, And Valentina Febriyanti. “Krisis Demokrasi Akibat Pengangkatan Pejabat Gubernur Dki Jakarta Tanpa Suara Rakyat.” *Jurnal Serina Sosial Humaniora* 1, No. 1 (2023): 631–40.
- Kurnia, Fabian Riza, And Rizari Rizari. “Tinjauan Yuridis Kewenangan Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Daerah.” *Transformasi: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 2019, 79–97.
- Kusnadi, Iwan Henri. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten Subang.” *Sawala: Jurnal Administrasi Negara* 8, No. 1 (2020): 30–57.
- Kusnadi, Iwan Henri, And Muhammad Rifqi Baihaqi. “Implementasi Kebijakan Sistem Online Single Submission (Oss) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpstsp) Di

Kabupaten Subang.” *The World Of Public Administration Journal*, 2020.

Kusnanto, Andi. “Quo Vadis Landasan Hukum Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah.” *Legal Spirit* 8, No. 1 (2024): 45. <https://doi.org/10.31328/Ls.V7i2.5049>.

Kusuma, Mochammad Tommy, Elva Imeldatur Rohmah, And Nafi Mubarak. “Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Menjelang Pemilihan Serentak 2024.” *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 2, No. 2 (2022): 1–33.

Langkay, Jefferson Gerald, Ronald J Mawuntu, And Dani R Pinasang. “Kajian Hukum Pelampauan Batas Kewenangan Pejabat Administrasi Yang Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.” *Lex Administratum* 11, No. 4 (2023).

Laode Harjudin, La Tarifu, Harnina Ridwan, And La Ode Muhammad Elwan. “Menggugat Penunjukkan Penjabat (Pj) Kepala Daerah Tanpa Pemilihan.” *Journal Publicuho* 5, No. 4 (2023): 1355–66. <https://doi.org/10.35817/Publicuho.V5i4.73>.

Leni Nur Indah Sari, “ *Pengisian Jabatan Sementara Gubernur Dari Kepolisian Republik Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah*”. Hukum Tata Negara. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Surabaya, 2018.

Logemann, Diterjemahkan Oleh Makkatutu Dan Pangkerego Dari Judul, *Asli Over De Theori Van Een Stelling Staatsrecht*, Universitaire Pers Leiden, 1948, *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*, (Jakarta: Ikhtiar Baru-Van Hoeve), 1990.

Maggalatung, A Salman. “Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Akibat Pilkada Serentak Dalam Perspektif Demokrasi.” Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, N.D.

Mahardika, Ahmad Gelora, Sun Fatayati, And Ferry Nahdian Furqan. “Problematisasi Yuridis Pengisian Penjabat Sementara Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 2, No. 2 (2022): 22–36.

Makhfud, Makhfud, Kristina Sulatri, And Yudhia Ismail. “Urgensi Asas

- Kelembagaan Atau Pejabat Pembentuk Yang Tepat Dalam Pembentukan Peraturan Desa.” *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum* 6, No. 1 (2024): 86–95.
- Marhadila, Farisna, Fiki Putra Firdaus, Ismi Dewi Rahma Kadilla, Putri Fatma Apriliani, And Novi Khoiriawati. “Optimalisasi Pentingnya Konsep Good Governance Dalam Sektor Publik Dan Privat.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital* 1, No. 4 (2024): 811–23.
- Mubarak, Ridho, And Wessy Trisna. “Penentuan Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintah.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, No. 2 (2021): 174–82.
- Muskita, Andre Stevian, And Gilda Aulya Moony Safitri. “Pengambilan Keputusan Dalam Kebijakan Publik Oleh Pejabat Publik Pengganti,” N.D.
- Nashrullah, Jauhar. “Tantangan Penyelenggaraan Pemilu Dan Pilkada Serentak Nasional 2024 Di Empat Provinsi Baru Papua.” *Lex Renaissance* 8, No. 2 (2023): 214–33.
- Nashrullah, Jauhar, And Georges Olemanu Lohalo. “The Establishment Of A New Autonomous Region Of Papua In State Administrative Law Perspective.” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 5, No. 2 (2022): 145–59. <https://doi.org/10.24090/Volksgeist.V5i2.6901>.
- Nursaomi, Nabila Putri. “Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Tugas Tim Percepatan Penurunan Stunting (Tpps) Di Kabupaten Garut Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tentang Percepatan Penurunan Stunting.” Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2024.
- Pamungkas, Catur Agil, And Anom Wahyu Asmorojati. “Menguji Ketepatan Penambahan Kewenangan Penjabat Melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri.” *Media Of Law And Sharia* 4, No. 2 (2023): 89–103.
- Patricia, Laurene. “Krisis Demokrasi Akibat Pengangkatan Pejabat Gubernur Dki Jakarta Tanpa Suara Rakyat.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, No. 1 (2023): 1465–73.
- Pemerintahan, Administrasi, Dengan Rahmat, Tuhan Yang, Maha Esa, And Presiden Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014, Nomor 292, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601),” No. 292 (2014).
- Pevi, Sundari. “Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Oleh Penjabat (Pj) Gubernur Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Hukum Tata Negara*, 2024.
- Prakoso, Jaffry Prabu. “Pemilu 2024 Bakal Berat! Ada Pilpres, 542 Kepala Daerah, Dan 20.528 Kursi Legislatif,” N.D. <https://Kabar24.Bisnis.Com/Read/20210903/15/1437646/Pemilu-2024-Bakal-Berat-Ada-Pilpres-542-Kepala-Daerah-Dan-20528-Kursi-Legislatif>.
- Pramudana, Ibnu, And Surya Perdana. “Analisis Kewenangan Pelaksana Tugas Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.” *Eduyustisia* 2, No. 1 (2023): 17–30.
- Pranata, Muhammad Rizky, And Panhar Makawi. “Tinjauan Umum Terhadap Pengangkatan Anggota Polri Aktif Untuk Menjabat Sebagai Kepala Daerah (Studi Kasus: Pengangkatan Komisaris Jendral (Komjen) Pol Mochamad Iriawan Sebagai Pj Gubernur Jawa Barat.)” *Jca Of Law* 1, No. 2 (2020).
- Pranoto, Sugeng, Sulis Sutiono, And Darmeli Nasution. “Penerapan Uml Dalam Perancangan Sistem Informasi Pelaporan Dan Evaluasi Pembangunan Pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi.” *Surplus: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2, No. 2 (2024): 384–401.
- Pratama, Alfani Aldi, Insan Tajali Nur, And Poppilea Erwinta. “Problematika Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Sebagai Dampak Penetapan Pilkada Serentak Tahun 2024.” *Jurnal Hukum Bisnis* 13, No. 01 (2024): 1–13.
- Pratama, Inka Nusamuda, Darmansyah Darmansyah, And Azwar Subandi. “Transformasi Good Governance Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Kota Mataram.” In *Seminar Nasional Lppm Ummat*, 2:1–13, 2023.
- Presiden Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,” 2014, 1–203.

Pringgodo, Heru Kunprasetyo. "Analisis Yuridis Penunjukan Pejabat Kepolisian Menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah." Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu, N.D.

Purwaningtyas, Lovika Augusta, And Bayu Dwi Anggono. "Pendelegasian Wewenang Pembentukan Undang-Undang Oleh Undang-Undang." *Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities* 4, No. 1 (2023): 21–40.

Puspita, Natalia Yeti, And Fachrudin Sembiring. "-Kewenangan Hukum Bpbd Dalam Penanggulangan Bencana Di Jakarta:-." *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 9, No. 2 (2024): 232–56.

Putra, I Gede Dedy Diana, And Komang Ayu Suseni. "Pecalang Dan Sinergitasnya Mewujudkan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Pada Dusun Tista Desa Baktiseraga Kabupaten Buleleng." *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu* 6, No. 2 (2023): 31–40.

Putri, Sofi Ekiana. "Kewenangan Kementerian Dalam Negeri Terkait Pemberian Mutasi Oleh Penjabat Kepala Daerah." Uin Kh Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.

Rafli, Muhammad Ade, Erlina Bachri, And Suta Ramadan. "Implementasi Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif (Studi Pada Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Ham Provinsi Lampung Dan Bank Indonesia: Kekayaan Intelektual ." *Journal Presumption Of Law* 5, No. 1 (2023): 87–108.

Rahayu, Nunung Puji. "Harmonisasi Hukum Pengaturan Masa Jabatan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Tahun 2020 (Studi Putusan Mkri Nomor 18/Puu-Xx/2022 Terhadap Pasal 28d Ayat (3) Uud Nri Tahun 1945 Dan Pasal 201 Ayat (7) Uu Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota)." Upn Veteran Jawa Timur, 2023.

Rahmazani. "The Problems Of Appointment Acting Officer Of Regional Head In The Transition Period Before The Election Of 2024." *Jurnal Konstitusi* 20, No. 2 (2023): 196–215. <https://doi.org/10.31078/jk2022>.

Rahmazani, Rahmazani. "Problematika Pengisian Jabatan Penjabat

- Kepala Daerah Di Masa Transisi Pra Pilkada 2024: The Problems Of Appointment Acting Officer Of Regional Head In The Transition Period Before The Election Of 2024.” *Jurnal Konstitusi* 20, No. 2 (2023): 196–215.
- Ramanda, Dio Ekie. “Menata Ulang Kewenangan Mengangkat Penjabat Kepala Daerah.” *Jisip (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 6, No. 3 (2022).
- Ramdani, Dadan. “Problematisasi Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024,” 2022.
- Razak, Askari. “Penunjukan Gubernur Oleh Presiden Dalam Wacana Ruu Daerah Khusus Jakarta: Kontroversi Dan Orientasi.” *Unes Law Review* 6, No. 2 (2023): 6242–52.
- Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi U,” 2016, 1–90. <https://doi.org/10.1017/Cbo9781107415324.004>.
- Ri, Bappenas. “Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.” *Demographic Research*, No. 1 (2020): 4–7.
- Ridwan, Ahmad, And Rd. Yudi Anton Rikmadani. “Analysis Of The Authority To Carry Out The Duties Of The Governor In The Implementation Of Local Government According To Regulations In Indonesia.” *Eduvest - Journal Of Universal Studies* 2, No. 2 (2022): 324–34. <https://doi.org/10.59188/Eduvest.V2i2.371>.
- Riniwati, Harsuko. *Manajemen Sumberdaya Manusia: Aktivitas Utama Dan Pengembangan Sdm*. Universitas Brawijaya Press, 2016.
- Rismahayani, Rismahayani, And Aprinelita Aprinelita. “Tinjauan Yuridis Penjabat Kepala Daerah Dalam Persiapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024.” *Kodifikasi* 5, No. 1 (2023): 16–30.
- Rizari, Fabian Riza Kurnia, And Fithrotulhana Afrilia. “Assignment Of Police

Officers As Provisional Governor: Case Study An Acting Officer's Governor Of West Java" 125, No. Icpapg 2019 (2020): 355–60. <https://doi.org/10.2991/Aebmr.K.200305.219>.

Roring, Edward Benedictus, Rafli Akmal Athallah, Christian Immanuel Situmorang, Muhammad Setyo Damar Kumor, And Irwan Triadi. "Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Di Amerika Serikat Dan Indonesia: Implikasi Terhadap Stabilitas Politik Nasional." *Communitarian: Jurnal Prodi Ilmu Politik* 6, No. 1 (2024).

Rosianti, Elshi Elvira, Jefik Zulfikar Hafizd, Mohamad Rana, And Sugianto Sugianto. "Kewenangan Dprd Dan Kepala Daerah Dalam Menetapkan Peraturan Daerah." *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, No. 2 (2024): 63–82.

Sakmaf, Marius Suprianto. "Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi Papua Barat Dalam Pengelolaan Situs Mansinam Sebagai Objek Wisata Religi Berbasis Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat." *Jppi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 9, No. 1 (2023): 203–11.

Saiful Ahmad, Fahmy Adriawan Simin, Muh. Haikal Umakaapa. Konflik Kewenangan Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Kasus Pejabat Bupati Pulau Morotai Maluku Utara Tahun 2022, Comserva. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, Volume 2 No. 09 Januari 2023 (1729-1742).

Santika, Wa, L M Ricard Zeldi Putra, And Hadi Supriyanto. "Tinjauan Hukum Batasan Kewenangan Pejabat Bupati Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." *Sultra Law Review* 5, No. 02 (2023): 6–11.

Saragih, Jopinus Ramli. "Analisis Manajemen Pemerintahan Dalam Pembangunan Desa Studi Dinamika Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa." *Atrabis Jurnal Administrasi Bisnis (E-Journal)* 10, No. 1 (2024): 132–42.

Sarajar, Juvisher Vigoh Rivaldo. "Kewenangan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Lex Et Societatis* 8, No. 4 (2020).

Sembiring, Efendi. "Analisis Yuridis Perluasan Wewenang Penjabat Kepala Daerah Terhadap Mutasi Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif

Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Terhadap Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/Sj).” Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2024.

Sugiharta, Iqbal Rifanda, Fauziyah Fauziyah, And Icha Cahyaning Fitri. “Kontroversi Pengisian Kekosongan Jabatan Gubernur Dalam Perspektif Demokrasi Di Indonesia.” *Indonesian Journal Of Law And Justice* 1, No. 4 (2024): 8. <https://doi.org/10.47134/ijlj.V1i4.2260>.

Susanto, Sri Nurhari. “Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan.” *Administrative Law And Governance Journal* 3, No. 3 (2020): 430–41.

Susi Dwi Harijanti, *Pengisian Jabatan Hakim, Kebutuhan Dan Pengekangan Diri*, Jurnal Ius Quia Iustum No.4 Vol.21 Oktober 2014, Fakultas Hukum Univesitas Padjajaran, Bandung.

Syafruddin, Syafruddin, And Siti Hasanah. “Analisis Dampak Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024.” *Journal Of Government And Politics (Jgop)* 4, No. 2 (2022): 252–69.

Taufiqurrahman, Taufiqurrahman, Siti Hasanah, And Firzhal Arzhi Jiwantara. “Sistem Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Di Negara Hukum Demokrasi (Studi Komparatif).” *Jatiswara* 38, No. 2 (2023): 241–54.

Triono, Suryo, And Septiana Novita Dewi. “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.” *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 21, No. 1 (2020): 213–20.

Usman, S. (2022). Polemik Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah. *Jurnal Sains, Sosial Dan Humaniora (Jssh)*, 2(1), 63–73. <https://doi.org/10.52046/Jssh.V2i2.1144>.

Wahyudi, Amar, Fauzi Syam, And Rustian Mushawirya. “Kewenangan Pejabat Pengganti Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan.” *Mendapo: Journal Of Administrative Law* 3, No. 3 (2022): 179–201.

Wibowo, Agus, And Dyah Listyarini. “Hukum Pemerintah Daerah.” *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 2024, 1–225.

Yuliansa, Dobi, Joni Helandri, Athika Nur Aulia Sahary, Yuni Pusfitasari, And Hodijah Artika. "Implementasi Prinsip Negara Hukum Dalam Meningkatkan Good Governance Di Indonesia." *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, No. 1 (2024): 39–60.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia

Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, Dan Penjabat Wali Kota.

Website

https://id.wiktionary.org/wiki/Melampaui_Wewenang.

<https://papuabaratdayapro.go.id/berita/14/pj-gubernur-pbd-melantik-pj-walikota-sorong-serta-menyerahkan-sk-perpanjangan-jabatan-pj-bupati.html>

<https://papuakini.co/2023/03/31/penjabat-gubernur-papua-barat-resuffle-1-asisten-1-kaban-6-kadis-1-karo-dan-1-staf-ahli/>

<https://www.jagatpapua.com/paulus-waterpauw-lantik-empat-lembaga-keagamaan-papua-barat/>

<https://www.radarhukum.com/wewenang-dalam-hukum-administrasi-negara.html>

<https://www.viva.co.id/berita/nasional/1520518-kppod-payung-hukum-pengangkatan-pj-kepala-daerah-tak-update>.